

**IMPLEMENTASI PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT
KEABSAHAN ALASAN GUGATAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

**(Studi Kasus Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr)
ABSTRAK**

Perceraian ialah suatu putusannya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidak harmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Akibat hukum terhadap suami istri, anak, dan harta bersama tentu timbul dari kasus perceraian yang sering kali berakhir di pengadilan. Mengingat konteks, para peneliti bersemangat untuk melakukan riset dengan judul “Implementasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Terkait Keabsahan Alasan Gugatan Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja (Studi Kasus Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr)”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjadi salah satu landasan hukum yang diangkat dalam penelitian ini bagi para hakim. Karena KHI merupakan sistem perundang-undangan yang lebih mendasar yang digunakan hakim dalam menentukan keputusannya maka hal tersebut memudahkan untuk memahami landasan putusan hakim mengenai perceraian dan dampak dari perceraian. Metode keadilan empiris digunakan dalam riset ini. Berdasarkan temuan riset penulis maka diambil pada perkara nomor 0131/Pdt.G/2023/PA.Sgr. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dan bukti-bukti yang mendukung tahapan yang telah dicapai, sehingga memungkinkan dihasilkannya suatu putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan meninjau perkara dan dalil-dalil pemohon sesuai dengan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hakim kemudian perlu mempertimbangkan tahapan persidangan. Anak-anak, pasangan, dan harta bersama semuanya terkena dampak perceraian. Pasal 149 Kompilasi Undang- undang menguraikan akibat bagi suami dan istri. Janda, atau mantan istri, tidak diperbolehkan menikah lagi selama tiga bulan, atau setidaknya sembilan puluh hari setelah perceraian, kecuali dengan mantan pasangannya. Pasal 156 KUHP mengatur tentang akibat hukum yang timbul karena mempunyai anak, sedangkan Pasal 97 KHI mengatur tentang akibat hukum yang timbul dari perceraian yang melibatkan harta bersama.

Kata Kunci: (Putusan Hakim, Perceraian, Gugatan Perceraian)

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 116 OF THE COMPILATION OF
ISLAMIC LAW REGARDING THE VALIDITY OF REASONS FOR
DIVORCE SUITS IN THE JURISDICTION OF THE SINGARAJA
RELIGIOUS COURTS
(CASE STUDY: SINGARAJA CITY, BULELENG DISTRICT, BULELENG
DISTRICT.)**

ABSTRACT

Divorce is a severance of the marital bond between two parties, namely husband and wife, due to the occurrence of disharmony in a fractured family relationship based on internal or external factors that occur. Legal consequences for husband and wife, children and joint assets naturally arise from divorce cases which often end in court. Considering the context, the researchers are enthusiastic about conducting research with the title "Implementation of Article 116 of the Compilation of Islamic Law Regarding the Validity of Reasons for Divorce Lawsuits in the Legal Area of the Singaraja Religious Court (Case Study of Singaraja City, Buleleng District, Buleleng Regency)". Republic of Indonesia Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage and KHI (Compilation of Islamic Law) is one of the legal bases raised in this research for judges. Because KHI is a more basic legal system that judges use in determining their decisions, it makes it easier to understand the basis of judges' decisions regarding divorce and the impact of divorce. Empirical justice methods are used in this research. Based on the author's research findings, a decision was made by the judge of the Singaraja Religious Court in case number 0131/Pdt.G/2023/PA.Sgr. The judge bases his decision on facts that have been proven to be true and evidence that supports the stages that have been achieved, thus making it possible to produce a decision. Before handing down a decision, the judge will review the case and the applicant's arguments in accordance with Article 39 of Law Number 1 of 1974 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. The judge then needs to consider the stages of the trial. Children, spouses, and joint assets are all impacted by divorce. Article 149 of the Compilation of Laws outlines the consequences for husbands and wives. A widow, or ex-wife, is not allowed to remarry for three months, or at least ninety days after the divorce, except to her ex-spouse. Article 156 of the Criminal Code regulates the legal consequences arising from having children, while Article 97 KHI regulates the legal consequences arising from divorce involving joint property.

Keywords: (Judge's Decision, Divorce, Divorce Lawsuit)